

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pengelolaan keuangan daerah dinilai masih kurang. Pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih kurang ialah pengelolaan APBD. APBD sebagai salah satu sumber keuangan suatu daerah yang harus dikelola dengan baik, agar daerah tersebut dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dalam mengelola APBD. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dapat hidup sejahtera. Perkembangan teknologi saat ini membuat tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah mendapat tuntutan akuntabilitas, sehingga seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strateginya, melakukan pengukuran kinerja serta melaporkan dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas.

Hal tersebut sangat perlu dilakukan sehingga dapat memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, diwajibkan kepada setiap kepala daerah menyajikan informasi keuangannya secara jujur dan terbuka kepada public. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah. Aksesibilitas (*accessibility*) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah.

Perkembangan teknologi saat ini membuat tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integrasi keuangan dan ketaatan terhadap undang-undang. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban public. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap badan publik untuk menyebarkan informasi publik secara berkala, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Penyajian laporan keuangan daerah yang komprehensif adalah salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan pertanggungjawaban laporan keuangannya kepada masyarakat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan sehingga dapat memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik. Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas terkait laporan

keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Disamping melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

Penelitian berkaitan dengan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Wahida (2015) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis.

Peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Wahida (2015), karena dalam penelitian tersebut hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, diwajibkan kepada setiap kepala daerah menyajikan informasi keuangannya secara jujur dan terbuka kepada publik. Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia diantaranya telah dilakukan oleh Mustofa (2012:3) dan Aliyah dan Nahar (2012:138) yang meneliti tentang